

## PERAN MANAJERIAL PENGELOLA PUSAT LAYANAN INTERNET KECAMATAN (PLIK) SEBAGAI AGEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Oliver Samuel Simanjuntak<sup>1</sup>, Dessyanto Boedi Prasetyo<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Teknologi Industri, UPN "Veteran" Yogyakarta

<sup>1</sup> email: oliversimanjuntak@yahoo.com

<sup>2</sup> email: dess95@gmail.com

### *Abstract*

*Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) support the expansion of Internet access services. PLIK be accelerated increase affordability of equity of services and utilization. On the application in the community, the operation PLIK have some constraints. One obstacle is the low operating PLIK, PLIK manager managerial role as an agent of community development towards the information society. Research successfully contribute in the form of strengthening the managerial role PLIK manager. Strengthening the managerial role is a derivative of the strengthening of the runway at every stage of managerial empowerment. Stages managerial empowerment grouped into four stages: planning, preparation, implementation and monitoring. Being a managerial role is as a Pengelola, Panutan, Dinamiasitor, Aktivis, Initiator (PANDAI) in empowerment. 1) Pengelola responsible for the activities PLIK operation. 2) Panutan against the digital divide and try to find ways of solving the problem. 3) Aktivis trigger and stimulate the process of new discoveries, or invite the public to utilize ICT in everyday society. 4) Initiator ensure the support of its strong resources in preparing the implementation of the operation PLIK. 5) Dinamiasitor carry out monitoring to ensure the support of its strong resources in determining the success of the operation of PLIK.*

**Keywords:** *PLIK, role, managerial, empowerment.*

### 1. PENDAHULUAN

Sebuah terobosan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat informasi yang diusahakan dan didorong pemerintah (KEMKOMINFO bekerjasama pemerintah daerah) yaitu dengan pengoperasian Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di DIY. PLIK merupakan warung internet (warnet) yang disubsidi dari KEMKOMINFO untuk menyediakan akses internet di seluruh Indonesia. Pengoperasian PLIK bertujuan mendukung perluasan layanan akses internet bagi masyarakat luas dan sebagai percepatan peningkatan keterjangkauan pemerataan layanan serta pemanfaatannya untuk tujuan peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah kecamatan. Program ini dimulai sejak tahun 2010 di mana pembiayaannya bersumber pada dana Universal Service Obligation (USO) yang merupakan dana kontribusi dari para penyelenggara layanan telekomunikasi (operator) sebesar 1,25 persen dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi. Pengoperasian PLIK untuk memperluas konektivitas dan menembus keterisolasian masyarakat yang belum mendayagunakan TIK merupakan satu langkah awal dalam pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat informasi. Pengoperasian PLIK diharapkan dapat menyiapkan kondisi komunitas untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui TIK.

Pada penerapan di masyarakat, pengoperasian PLIK memiliki kendala, salah satu kendala pengoperasian PLIK dikarenakan rendahnya penguatan peran manajerial pengelola PLIK sebagai agen pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat informasi. Rendahnya penguatan peran manajerial pengelola sebagai agen pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat informasi dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Menurut Budiman (2013), PLIK tidak beroperasi dengan baik

dikarenakan minimnya tenaga supervisor/pengawas dari pengelola/mitra pengelola PLIK, kurangnya koordinasi dan keseriusan pihak pengelola/mitra pengelola dalam pengoperasian PLIK, minimnya sosialisasi oleh pengelola PLIK, pengawasan pengelola PLIK terhadap program yang tidak berjalan dengan baik. 2) Menurut Masita (2014), keterbatasan sumber daya manusia pengelola PLIK membuat pengelolaan tidak maksimal. 3) Menurut Saleha dan Anshori (2014), pengelola PLIK merupakan lulusan sekolah menengah pertama yang tidak memiliki keterampilan yang memadai di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan tidak mampu menjadi teknisi untuk peralatan TIK sehingga apabila terdapat kerusakan akan sangat sulit sekali untuk diselesaikan, tidak adanya dukungan dari pendidikan untuk mensukseskan implementasi PLIK, tidak adanya koordinasi dengan pemangku kebijakan di masyarakat, lemahnya partisipasi masyarakat dalam implementasi PLIK.

Penelitian "peran manajerial pengelola PLIK sebagai agen pemberdayaan masyarakat" menuju masyarakat informasi diharapkan dapat memberi kontribusi berupa peran manajerial pengelola PLIK sebagai agen pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat informasi. Penguatan peran manajerial pengelola PLIK sebagai agen pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat informasi harus dapat diidentifikasi dengan tepat, sehingga kemudian PLIK yang berada di masyarakat dapat menemukan konteksnya dan memberikan manfaat langsung pada masyarakat yang belum mendayagunakan TIK. Penguatan peran manajerial pengelola PLIK diharapkan mampu meningkatkan persepsi masyarakat dalam menerima atau memanfaatkan TIK. Peningkatan persepsi masyarakat terhadap pendayagunaan TIK dapat mewujudkan masyarakat di Propinsi DIY yang berdaya terhadap informasi. Masyarakat DIY yang berdaya terhadap informasi akan memiliki kesadaran dan kebutuhan terhadap informasi sebagai sumber kekuatan. Masyarakat dapat menggunakan informasi untuk terlibat dalam proses pembangunan yaitu mengambil keputusan yang baik bagi dirinya sendiri, bertindak secara kritis dalam upaya memperbaiki keadaan dan mengatasi masalahnya sendiri, mampu terlibat dalam proses-proses sosial dan politik termasuk dalam proses pengambilan keputusan publik yang dilakukan komunitasnya (Kadiman, 2006). Secara khusus, keterlibatan masyarakat dalam menggunakan informasi untuk proses pembangunan Propinsi DIY sebagai *cyber province (Jogja Cyber Province)*.

## 2. KAJIAN LITERATUR

Menurut Handoko (2009), manajemen adalah cara sistematis untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen bersifat universal dan mempergunakan kerangka ilmu pengetahuan yang sistematis, mencakup kaidah-kaidah, prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang cenderung benar dalam semua situasi manajerial. Manajemen diterapkan dalam semua organisasi manusia, seperti perusahaan, pemerintah, pendidikan, sosial, keagamaan, dan lain-lainnya. Ada 3 tujuan utama penerapan manajemen dalam organisasi diperlukannya manajemen: 1) Untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi. 2) Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi. 3) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum adalah efisiensi dan efektivitas. Dalam pencapaian tujuan organisasi, manajemen melaksanakan fungsi-fungsi manajerial. Fungsi-fungsi manajerial tersebut adalah (Handoko, 2009): 1) Perencanaan. Perencanaan terjadi di semua tipe kegiatan. Perencanaan adalah proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara pencapaiannya. Semua kegiatan manajemen bergantung pada kegiatan perencanaan, kegiatan lain tidak akan berhasil tanpa perencanaan dan pembuatan keputusan yang tepat, cermat dan kontinyu. Perencanaan didasarkan pada berbagai metoda, rencana atau logika, bukan hanya atas dasar dugaan dan firasat. 2) Pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan, sumberdaya-sumberdaya dan lingkungan organisasi. Kekuatan suatu organisasi terletak pada

kemampuan menyusun berbagai sumber daya dalam dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Semakin terkoordinasi dan terintegrasi, kerja organisasi akan semakin efektif dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi. 3) Pengarahan. Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan, memimpin dan mempengaruhi karyawan untuk bergerak menuju tujuan yang telah ditentukan. Pengarahan melibatkan kualitas, gaya dan kekuasaan pemimpin. Pemimpin tidak sekedar memberikan perintah tetapi menciptakan iklim yang dapat membantu para bawahan melakukan pekerjaan secara paling baik. 4) Pengawasan. Pengawasan adalah kegiatan menjamin organisasi bergerak ke arah tujuan-tujuannya. Semua kegiatan manajemen tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan/pengendalian.

Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowojoto, (2007), agen pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat informasi adalah asosiasi profesi, perusahaan swasta, kalangan akademisi, masyarakat madani atau pemerintah yang mengusahakan dan mendorong pemberdayaan bagi masyarakat yang belum mendayagunakan TIK. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan persepsi masyarakat terhadap kemudahan dan kemanfaatan pendayagunaan TIK. Tugas pokok agen pemberdayaan adalah menyebarkan pikiran-pikirannya sehingga mampu mempengaruhi kehidupan kultural dan intelektual pada masyarakat. Agen pemberdayaan melakukan langkah-langkah inovatif dan terorganisir untuk mengarahkan kelompok masyarakat yang kemampuannya masih lemah agar lebih berdaya dan akhirnya mampu memperkuat kesejahteraannya. Agen pemberdayaan dibedakan berdasar sifat perannya dalam pemberdayaan, yaitu: 1) Pemikir/inovator. Pemikir berfungsi melakukan proses pemikiran yang mendalam terhadap situasi sosial yang sedang terjadi dan mencoba menemukan cara pemecahan masalah. 2) Pelopor/inisiator. Pelopor memicu dan memacu proses penemuan baru atau mengajak menerapkan ide-ide baru. 3) Penerus/fasilitator. Penerus meneruskan proses yang sedang berkembang yang berangkat dari ide-ide baru dalam rangka menjaga kontinuitas proses yang sedang berlangsung dan menjamin keberlanjutan hasil-hasil proses yang sudah berlangsung. 4) Penegak/dinamisator. Penegak meluruskan dan mengingatkan tentang hal-hal yang sedang berkembang namun tidak sesuai dengan arah yang ada. 5) Pemimpin/ Aktor Pemimpin memimpin rakyat dan berdiri di tengah-tengah semua golongan untuk mengembangkan hasil-hasil yang sudah ada untuk bergerak lebih maju.

Menurut Sharma dan Mokhtar (2005), faktor dasar yang harus tersedia guna pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat informasi dapat dianalogikan sebagai ketersediaan *hardware, software, service*. Faktor-faktor dasar yang harus tersedia guna pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat informasi, yaitu: 1) Menyediakan infrastruktur TIK bagi masyarakat. Ketersediaan infrastruktur TIK bagi masyarakat merupakan "*obvious and essential foundation to the information society*." Dari uraian itu, ketersediaan infrastruktur TIK bagi masyarakat merupakan dasar dalam pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat informasi. Komponen infrastruktur TIK berupa *hardware, software*, jaringan telekomunikasi dan layanan internet. 2) Menyediakan akses informasi bagi masyarakat. Ketersediaan akses informasi bagi masyarakat mencakup "*includes not just the availability of content and applications but its affordability as well. The issue of usability is also relevant, given that 80% of Internet content is in English*." Dari uraian tersebut, ketersediaan akses informasi perlu juga mempertimbangkan ketersediaan, kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat dalam mengakses informasi. Sebagai contoh adalah menyediakan konten di internet yang disesuaikan dengan bahasa masyarakat setempat. 3) Mempromosikan *e-literacy* pada masyarakat. *E-literacy* adalah "*ability to access, evaluate and use information from a variety of sources*." Dari uraian tersebut, *e-literacy* adalah kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi dan menggunakan informasi dari berbagai sumber.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang meliputi 4 Kabupaten dan non Kotamadya, yaitu: Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul. Pada tiap Kabupaten, peneliti melaksanakan penelitian di 4 (empat) PLIK. Total tempat penelitian di Propinsi DIY berjumlah 16 (enam belas) PLIK. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 30 Maret hingga 14

September 2015. Subjek penelitian merupakan sumber informasi yang dapat memberikan informasi mengenai keadaan yang sebenarnya dari permasalahan penelitian di lapangan sehingga diperoleh data yang akurat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sample* dengan memilih subjek penelitian menurut pertimbangan tertentu. Adapun subjek penelitian ini adalah pengelola PLIK dan masyarakat yang berada pada area operasi PLIK.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian dilakukan secara teliti, mendalam dan menyeluruh untuk mendapatkan gambaran mengenai prinsip-prinsip umum atau pola-pola yang berlaku umum sehubungan dengan gejala yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat yang diteliti sebagai kasus itu sendiri. Penelitian dilaksanakan berdasarkan kejadian empiris pada daerah penelitian yang digambarkan melalui analisis dekriptif naratif yang menjelaskan tentang fenomena peran pengelola PLIK sebagai agen pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat informasi. Dari berbagai temuan dari lapangan selanjutnya akan dijadikan evaluasi peran pengelola PLIK. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2001). Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi terkait persiapan peneliti untuk terjun ke lapangan. Validasi instrumen penelitian meliputi pemahaman mengenai metode penelitian kualitatif dan penguasaan mengenai objek penelitian yaitu evaluasi peran pengelola PLIK. Sehingga dengan demikian peneliti mampu bertanya, menggali informasi, membuat analisis, mendokumentasikan, dan mengonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

Penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahap penelitian, sebagai berikut: 1) Tahap persiapan. Pada tahap ini peneliti melaksanakan kajian pustaka dari berbagai literatur dan hasil penelitian terdahulu dengan tujuan untuk mengumpulkan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti yaitu konsep pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat informasi untuk mereduksi kesenjangan digital dan konsep *telecenter* (secara khusus PLIK). Konsep yang dikaji dijadikan landasan teori penelitian oleh peneliti. 2) Tahap pengumpulan data. Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, sehingga teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain : wawancara, dokumentasi dan observasi. 3) Tahap Pemeriksaan Keabsahan Data. Untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data, peneliti menggunakan model triangulasi. Menurut Moleong (2007: 177) triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai cara dan berbagai waktu. Proses triangulasi yakni dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber, waktu, dan alat yang berbeda. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan ialah triangulasi sumber. Dalam pelaksanaannya, untuk mengetahui keabsahan data, peneliti menanyakan pertanyaan yang sama terhadap informan yang berbeda. Jawaban kemudian dianalisis dan disimpulkan. Apabila jawaban dari para informan terdapat banyak kesamaan, maka telah tercapai keabsahan data, sebaliknya apabila jawaban dari para informan terdapat banyak perbedaan maka data dapat dikatakan belum sah. 4) Tahap Analisis Data, menyatakan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumen resmi, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Proses analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga alur yaitu : *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), *Verification* (Kesimpulan)

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menggambarkan peran manajerial pengelola PLIK di DIY dengan identifikasi terhadap SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities dan Threat*) yang secara lebih rinci dapat diurai sebagai berikut:

- 1) Kekuatan (*Strength*). Faktor-faktor kekuatan adalah semua potensi yang dimiliki pengelola PLIK, khususnya yang bersifat menguntungkan atau mengandung nilai lebih, sehingga dapat dipakai untuk memudahkan mencapai tujuan, yaitu: a) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No 1 Tahun 2013 tentang penyediaan jasa akses internet pada wilayah

- elayanan universal telekomunikasi internet kecamatan. b) Peraturan Daerah Provinsi DIY No 6 Tahun 2008 tentang pembentukan dan organisasi dinas daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY. c) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 42 Tahun 2006 tentang Blueprint Jogja Cyber Province Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. d) Adanya komitmen pengelola PLIK untuk menindaklanjuti pengoperasian PLIK dalam rangka pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat informasi di DIY. e) Adanya kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan terhadap operasional PLIK sehingga pelaksanaan pengoperasian dapat berjalan sinergis.
- 2) Kelemahan (*Weakness*). Faktor-faktor kelemahan yang akan digambarkan dalam bagian ini adalah segala situasi dan kondisi yang berasal dari pengelola PLIK yang bersifat tidak mendukung dan dapat menghambat tercapainya tujuan, yaitu: a) Tidak adanya gambaran secara jelas langkah dan tindakan (upaya) pemberdayaan yang harus diambil pengelola PLIK bilamana dihadapkan pada konteks yang berlaku di masyarakat. b) Belum adanya agen pemberdaya pengganti yang dapat mengelola PLIK sehingga dalam pengelolaannya sering kali bertumpu pada satu orang saja. c) Rendahnya kualitas SDM pengelola PLIK yang menyangkut kemampuan dan motivasi dalam melaksanakan tugasnya. d) Kemampuan pengelola PLIK dalam memelihara atau memperbaiki sarana dan prasarana untuk mendukung pengoperasian PLIK.
  - 3) Peluang (*Opportunities*). Faktor-faktor peluang adalah semua potensi yang ada di sekitar lingkungan kerja pengelola PLIK yang bersifat menguntungkan dan dapat dimanfaatkan atau diberdayakan untuk memudahkan pengelola PLIK dalam mencapai tujuan pemberdayaan, yaitu: a) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Kerangka Kebijakan Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. b) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Fokus Program Pengembangan Ekonomi Tahun 2005 – 2008. c) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2004 – 2009 mengenai Target Pengembangan Pusat Akses Informasi Masyarakat. Mengacu pada PJP, rencananya pemerintah akan menghubungkan desa dan institusi pendidikan dan kesehatan dengan akses TIK.. d) Komitmen pemerintah dalam *World Summit Information Society (WSIS)* pertama di Jenewa 2003 dan WSIS kedua di Tunisia 2005. e) Inpres No 5 Tahun 2008 tentang Percepatan penyelenggaraan pembangunan 2009 – 2010.
  - 4) Ancaman (*Threat*). Faktor-faktor ancaman adalah semua situasi dan kondisi yang berada di luar lingkungan pengelola PLIK yang dapat menyebabkan kegagalan ataupun menghambat tim mencapai tujuannya, yaitu: a) Kurangnya perhatian dari beberapa instansi, kalangan akademis dan tokoh masyarakat yang peduli dengan kesenjangan digital di DIY. b) Adanya pengaruh pengoperasian PLIK pada masyarakat yang sudah mendayagunakan TIK dengan upaya pemberian kesempatan. c) Adanya pengaruh ketidaksesuaian kebutuhan, permasalahan, potensi masyarakat dalam mendayagunakan TIK dengan upaya pemihakan. d) Adanya pengaruh ketidaksepakatan tokoh masyarakat dan masyarakat setempat dengan upaya penguatan.

Berdasar analisis SWOT yang dilakukan, penulis, penguatan peran manajerial pengelola Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) sebagai agen pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat informasi sangatlah penting. Pada PLIK, pengelola PLIK menentukan tingkat keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi kesenjangan digital yang ada di masyarakat. Pengelola PLIK sebagai agen pemberdayaan masyarakat berada di garda terdepan pemberdayaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Penguatan peran pengelola PLIK diperlukan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang lebih efektif. Penguatan peran manajerial merupakan turunan dari penguatan landasan pada tiap tahapan manajerial pemberdayaan. Tahapan manajerial pemberdayaan dikelompokkan dalam 4 tahap, yaitu: tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pemantauan. Penguatan peran pengelola PLIK yang berpegang pada landasan pemberdayaan dalam tiap tahapan manajerial dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tahap manajerial perencanaan. Tahap manajerial perencanaan meliputi keseluruhan tugas dan fungsi pengelola PLIK yang berperan sebagai pengelola dalam membangun landasan yang kuat bagi tahap-tahap pengoperasian PLIK. Pengelola PLIK yang berperan sebagai pengelola (bendahara dan administrasi) bertanggung jawab secara umum atas kegiatan pengoperasian PLIK. Tanggung jawab utama pengelola PLIK yang berperan sebagai pengelola adalah memastikan bahwa PLIK yang dikelola akan berjalan sesuai tujuan. Pada tahap manajerial

- perencanaan, landasan pemberdayaan yang kuat bagi pengelola PLIK yang berperan sebagai pengelola adalah dalam upaya pemberian kesempatan, pemihakan dan penguatan pendayagunaan TIK bagi masyarakat. a) Pemberian kesempatan oleh pengelola bertujuan untuk menentukan sasaran pemberdayaan yang tepat. b) Pemihakan oleh pengelola bertujuan menjadi landasan pemberdayaan yang sesuai aspirasi kelompok masyarakat sasaran pemberdayaan. c) Penguatan oleh pengelola bertujuan menjadi landasan pengoperasian PLIK yang disepakati bersama sebagai jawaban dari permasalahan, kebutuhan dan potensi pendayagunaan TIK bagi masyarakat. Secara rinci, peran manajerial pengelola PLIK sebagai pengelola memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: a) Penanggung jawab secara umum penyelenggaraan kegiatan dan layanan pengoperasian PLIK dalam rangka pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat informasi. b) Mengkoordinasikan seluruh kerja/tahapan pengoperasian PLIK. c) Mempromosikan kegiatan PLIK. d) Membuat, mengembangkan dan mereview aturan dan prosedur yang terkait dengan operasional PLIK. e) Mencari peluang kerjasama dengan kalangan akademisi, tokoh masyarakat, pihak swasta dalam memberdayakan masyarakat menuju masyarakat informasi. f) Melakukan evaluasi atas kinerja pengoperasian PLIK. g) Menjalankan kewajiban penyedia PLIK sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, nomer 1 tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan, pasal 10.
- 2) Tahap manajerial persiapan. Tahap manajerial persiapan meliputi keseluruhan tugas dan fungsi pengelola PLIK yang berperan sebagai panutan. Tahap persiapan bertujuan memastikan dukungan sumber daya internal dan eksternal yang kuat dalam melaksanakan pengoperasian PLIK. Pengelola PLIK yang berperan sebagai panutan adalah melakukan proses pemikiran yang mendalam terhadap kesenjangan digital di masyarakat dan mencoba menemukan cara pemecahan masalah, yaitu dengan mendayagunakan TIK, serta menjadi pelaku utama pendayagunaan TIK di PLIK. Pada tahap manajerial perencanaan, landasan pemberdayaan yang kuat bagi pengelola PLIK yang berperan sebagai panutan menguatkan metode, kesiapan sumber daya, maupun kerjasama dengan pihak terkait. a) Panutan menguasai metoda pemberdayaan bertujuan untuk memberi gambaran secara jelas langkah dan tindakan pemberdayaan yang harus diambil panutan bilamana dihadapkan pada konteks yang berlaku di masyarakat. b) Panutan perlu dibekali dengan cara-cara melaksanakan fasilitasi melalui PLIK. Selanjutnya secara berkala perlu ditingkatkan kemampuannya mengenai teknik-teknik fasilitasi. c) Panutan memiliki keterbatasan, untuk itu perlu bekerja sama dengan pihak lain. Secara rinci, peran manajerial pengelola PLIK sebagai panutan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: a) Melakukan observasi di lapangan guna mengukur tingkat kemauan, kemampuan masyarakat dan kondisi lingkungan setempat terkait pendayagunaan TIK. b) Melakukan diskusi bersama warga masyarakat guna mengumpulkan aspirasi dan membangun kesepakatan. c) Membangun kesepakatan bersama tokoh masyarakat dan masyarakat setempat. d) Menyusun draft rencana program pengoperasian PLIK dengan melibatkan warga masyarakat. e) Menjadi pelaku utama yang aktif mendayagunakan TIK untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupannya dan keluarga, serta masyarakat.
- 3) Tahap manajerial pelaksanaan. Tahap manajerial pelaksanaan pemberdayaan masyarakat meliputi keseluruhan tugas dan fungsi pengelola PLIK yang berperan sebagai aktivis dan inisiator dalam rangka memberdayakan masyarakat menuju masyarakat informasi. Pengelola PLIK yang berperan sebagai aktivis dan inisiator dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Peran pengelola PLIK sebagai aktivis pemberdayaan adalah memicu dan memacu proses penemuan baru atau mengajak masyarakat menerapkan pendayagunaan TIK dalam kehidupan sehari-harinya. Peran pengelola PLIK sebagai aktivis pemberdayaan terdiri dari: pendamping masyarakat dan operator, sedang b) peran inisiator adalah memastikan dukungan sumber daya yang kuat dalam menyiapkan pelaksanaan pengoperasian PLIK. Secara rinci, peran manajerial pengelola PLIK sebagai aktivis dan inisiator memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: a) Memberi sosialisasi program PLIK bertujuan memberikan pemahaman dan persepsi terhadap pengoperasian PLIK yang berorientasi pada keterlibatan peran serta dan keberpihakan masyarakat yang belum memiliki akses TIK. b) Memberikan pengoperasian rutin PLIK bertujuan memberikan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan. c) Memberikan pengayaan wawasan bertujuan meningkatkan kemanfaatan pendayagunaan TIK. Pengayaan wawasan meminta bantuan narasumber untuk memperkaya pengetahuan dan

- menceritakan pengalaman pendayagunaan TIK. d) Memastikan sumber daya dapat menunjang pengoperasian PLIK dengan baik. e) Menyelesaikan masalah yang muncul akibat kerusakan pada perangkat penunjang. f) Menangani keluhan pengguna PLIK yang berkaitan dengan perangkat TIK. g) Mengembangkan media-media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat. h) Membuat/mengisi laporan harian yang berisi tentang penggunaan fasilitas PLIK dan kerusakan perangkat. i) Merawat TIK yang tersedia di PLIK, menjalin hubungan dengan mitra yang dibutuhkan apabila terdapat persoalan teknis.
- 4) Tahap manajerial pemantauan. Tahap manajerial pemantauan meliputi keseluruhan tugas dan fungsi pengelola PLIK yang berperan sebagai dinamisor. Tahap pemantauan bertujuan memastikan dukungan sumber daya internal dan eksternal yang kuat dalam menentukan keberhasilan pengoperasian PLIK. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan oleh dinamisor. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan untuk memantau, mengevaluasi dan melaporkan jalannya tahapan pengoperasian PLIK dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Secara rinci, peran manajerial pengelola PLIK sebagai dinamisor memiliki tugas dan fungsi sebagai: a) Pemantauan dan evaluasi persiapan bertujuan meningkatkan pengendalian kesiapan dukungan dan kemampuan sumberdaya dalam rangka melaksanakan pengoperasian PLIK. Pemantauan persiapan dilaksanakan secara internal oleh dinamisor. b) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bertujuan meningkatkan pengendalian layanan dan pendampingan pendayagunaan TIK yang mudah dan bermanfaat. Pemantauan pelaksanaan dilaksanakan oleh dinamisor dan tokoh masyarakat setempat

## 5. KESIMPULAN

Penguatan peran manajerial pengelola PLIK sebagai agen pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat informasi sangatlah penting. Pengelola PLIK sebagai agen pemberdayaan masyarakat berada di garda terdepan pemberdayaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Penguatan peran manajerial pengelola PLIK diperlukan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang lebih efektif. adalah melakukan peran sebagai Pengelola, Panutan, Dinamisor, Aktivistis, Inisiator (PANDAI) untuk memberi penguatan pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi kelompok masyarakat yang kemampuannya masih lemah agar lebih kuat/berdaya. Langkah-langkah Pengelola, Panutan, Dinamisor, Aktivistis dan Inisiator (PANDAI) dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Pengelola. Peran pengelola PLIK sebagai pengelola (bendahara dan administrasi) bertanggung jawab secara umum atas kegiatan pengoperasian PLIK. Tanggung jawab utama pengelola adalah memastikan bahwa PLIK yang dikelola akan berjalan sesuai tujuan. b) Panutan. Peran pengelola PLIK sebagai panutan adalah melakukan proses pemikiran yang mendalam terhadap kesenjangan digital di masyarakat dan mencoba menemukan cara pemecahan masalah, yaitu dengan mendayagunakan TIK, serta menjadi pelaku utama pendayagunaan TIK di PLIK. c) Dinamisor. Peran pengelola PLIK sebagai dinamisor adalah meluruskan, mengingatkan dan mengendalikan tim pemberdayaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. d) Aktivistis Pemberdayaan. Peran pengelola PLIK sebagai aktivis pemberdayaan adalah memicu dan memacu proses penemuan baru atau mengajak masyarakat menerapkan pendayagunaan TIK dalam kehidupan sehari-harinya. Peran pengelola PLIK sebagai aktivis pemberdayaan terdiri dari: pendamping masyarakat dan operator. e) Inisiator. Tugas utama inisiator adalah memastikan dukungan sumber daya yang kuat dalam menyiapkan pelaksanaan pengoperasian PLIK.

## 6. REFERENSI

- Budiman, Ahmad. 2013. *Info Singkat Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)*. Volume V, Nomer 13/I/P3DI/Juli/2013. Sekretariat Jendral DPR RI,
- Handoko, T. Hani. 2009. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Kadiman, Kusmayanto. 2006. *Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2005-2025*. Jakarta: Kementrian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
- Masita, Marsha. 2014. *Evaluasi Pelaksanaan Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Klaten*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

- Moleong, L. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Saleha, Eha; & Anshori, Yuli Tirtariandi El. 2014. *Implementasi Program Penyedia Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobil Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Rejang Lebong*. <http://www.pustaka.ut.ac.id>. Diakses tanggal 10 Agustus 2015. Pukul 08.05 WIB.
- Sharma, Ravi; & Mokhtar, Intan Azura. 2005. *Bridging the Digital Divide in Asia*. Australia: International Journal of Technology, Knowledge and Society.
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Wrihatnolo, Randy R; & Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.